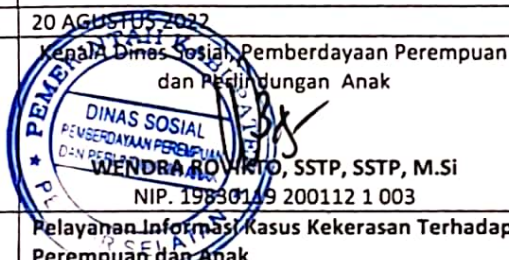


DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN	Nomor SOP	067/011.1 /DSPPrPA-PS/2022
	Tanggal Pembuatan	1 AGUSTUS 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	20 AGUSTUS 2022
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
	Judul SOP	Pelayanan Informasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. 7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang. 10. Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. 11. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan. 12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak. 13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. 1. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 2. Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten layak Anak . 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai informasi publik 2. Memahami tata cara pemberian pelayanan informasi di UPTD PPA
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
Prosedur Pelayanan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Terkait 2. Telepon 3. Komputer 4. Alat Tulis Kantor

SOP Pelayanan Informasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Petugas Layanan	Staf Administrasi	Pelapor	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Petugas Layanan mencatat pertanyaan yang diajukan oleh pelapor dan kemudian meminta staf administrasi untuk menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan terkait dengan pertanyaan yang diajukan pelapor				Berkas Pengaduan dan Data Pendukung	5 menit	Data Pengaduan
2.	Staf administrasi mengumpulkan bahan-bahan terkait kasus perempuan dan anak dan menyampaikan kepada petugas layanan				Berkas Pengaduan, peraturan perundangan, dan Data Pendukung	30 menit	Informasi Kebutuhan Pelapor
3.	Petugas layanan menjelaskan informasi yang dibutuhkan pelapor				Informasi Kebutuhan Pelapor	30 menit	Informasi Kebutuhan Pelapor
4.	Pelapor menerima layanan informasi yang dibutuhkan.						Layanan Informasi